

PROSPEK MODEL-KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (M-KRPL) DAN REPLIKASI PENGEMBANGAN KRPL

Prospect of the Model of Sustainable Food Houses Region (M-KRPL) and Its KRPL Replication

Saptana, Sunarsih, dan Supena Friyatno

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70, Bogor 16161
E-mail : saptano_07@yahoo.co.id*

Tanggal naskah diterima : 6 Mei 2013

Tanggal naskah disetujui terbit: 24 Juni 2013

ABSTRACT

Food security issues deal with critical problem, namely food demand grows faster than that of production. To achieve food self-sufficiency and food security, the Ministry of Agriculture Indonesia through Indonesian Agency for Agricultural Research and Development develops the Model of Sustainable Food Houses Region (M-KRPL) and its replication, namely the Sustainable Food Houses Region (KRPL). The concept of M-KRPL and KRPL programs needs to be refined primarily due to program design, implementation period, implementing organizations, introduced technologies, and strengthened local institutions. Implementation of M-KRPL and KRPL should be carried out through excellent social process and stages of growth, i.e. growing, developing, maturation, and self-reliance. M-KRPL replication should take account the technology use as well as community empowerment. M-KRPL and KRPL is promising in terms of technical, economic and institutional aspects. Important policy implications are: (a) taking accounts the technical aspect and social-economic characteristics of the targeted groups, (b) program period must be at least three years along with the growth stages; (c) the main M-KRPL and KRPL implementing organizations are the Assessment Institute for Agricultural Technology (AIATs) and Regional governments, respectively; (d) the technology introduced consists of nursery, farm practice, post harvest, and processing; and (e) managerial and capital development.

Keywords: *prospect, sustainable food houses region, replication, sustainability.*

ABSTRAK

Pembangunan ketahanan pangan dihadapkan pada permasalahan pokok, dimana pertumbuhan permintaan pangan adalah lebih cepat dari pertumbuhan produksinya. Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan dan ketahanan pangan, Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian mengembangkan Model Kawasan Rumah pangan Lestari (M-KRPL) dan replikasinya menjadi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Konsep program M-KRPL dan KRPL perlu disempurnakan terutama terkait dengan rancangan program, jangka waktu pelaksanaan, organisasi pelaksana, serta teknologi yang diintroduksikan dan penguatan kelembagaan lokal. Payung hukum M-KRPL dan KRPL adalah : UU No.7 tahun 1966 tentang Pangan; PP No.68 tentang Ketahanan pangan; PP No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; serta PP No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Implementasi replikasi M-KRPL menjadi KRPL seyogyanya dilakukan melalui proses sosial yang matang melalui tahap penumbuhan, pengembangan, pematangan, dan kemandirian. Replikasi M-KRPL menggunakan *entry point* teknologi dan sekaligus kelembagaan, serta berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat. Pengembangan M-KRPL dan KRPL memiliki prospek baik dan berkelanjutan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan kelembagaan. Implikasi kebijakan penting adalah : (a) rancangan program harus memperhatikan aspek teknis dan karakteristik sosial ekonomi kelompok sasaran; (b) jangka waktu program minimal 3 (tiga) tahun melalui tahap penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian; (c) organisasi pelaksana utama M-KRPL adalah BPTP, sedangkan KRPL adalah Pemerintah Daerah; (d) teknologi yang diintroduksikan mencakup teknologi pembibitan, budidaya, serta pasca panen dan pengolahan hasil; dan (e) penguatan kelembagaan pengelola M-KRPL dan KRPL baik dari aspek manajemen, permodalan, dan partisipasi anggota.

Kata kunci : *prospek, kawasan rumah pangan lestari, replikasi, keberlanjutan*

PENDAHULUAN

Pembangunan ketahanan pangan dihadapkan pada permasalahan pokok, dimana pertumbuhan permintaan pangan adalah lebih cepat dari pertumbuhan produksinya. Secara nasional, cepatnya pertumbuhan permintaan pangan baik dari sisi jumlah, mutu dan keragamannya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : pertumbuhan penduduk, pertumbuhan industri, dayabeli masyarakat, serta perubahan preferensi konsumen. Di sisi lain, kapasitas produksi pangan nasional terkendala oleh kompetisi dalam penggunaan lahan, perubahan iklim ekstrim, fenomena degradasi sumberdaya alam dan lingkungan, dan terbatasnya dukungan infrastruktur pertanian.

Organisasi dunia pangan dan pertanian (*Food and Agriculture Organization/FAO*) (2001) memperkirakan sekitar 65 negara berkembang akan menghadapi risiko kehilangan produksi sereal sebesar 280 juta ton sebagai akibat dampak perubahan iklim global. Ancaman perubahan iklim global terhadap ketahanan pangan di Indonesia dikemukakan oleh Arifin (2010) bahwa perubahan iklim global akan menurunkan produksi pangan sampai 20 persen. Dalam situasi tersebut maka pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian pangan keluarga dipandang merupakan langkah yang cukup strategis.

Secara nasional, luas lahan pekarangan adalah sekitar 10,3 juta ha atau 14 persen dari keseluruhan luas lahan pertanian (Badan Litbang Pertanian, 2011). Kementerian Pertanian memanfaatkan potensi tersebut untuk mewujudkan kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik untuk rumah tangga perdesaan maupun perkotaan melalui pengembangan Model-Kawasan Rumah pangan Lestari (M-KRPL) dan replikasinya menjadi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Prinsip dari M-KRPL sebagaimana tercantum dalam Pedum 2011 yaitu dibangun dari kumpulan rumah tangga yang mampu mewujudkan kemandirian pangan melalui pemanfaatan pekarangan, dapat melakukan upaya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal dan sekaligus pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, serta peningkatan kesejahteraan rumah tangga.

Kata *rw* dan *rl* menjadi dua kata kunci dari program M-KRPL/KRPL. Konsep kawasan dirancang untuk pengem-

banagan M-KRPL/KRPL dalam suatu kawasan yang relatif terkonsentrasi sehingga memudahkan dalam pengelolaan, pendampingan, serta memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat karena mampu menghasilkan produk pangan yang dapat dipasarkan. Sementara itu, konsep lestari dirancang dengan pengembangan Kebun Bibit Desa (KBD) dan Kebun Bibit Induk (KBI) di masing-masing BPTP agar program ini dapat berkelanjutan (Badan Litbang Pertanian, 2011).

Berdasar latar belakang tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian mengembangkan suatu Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (Model M-KRPL) dan replikasinya yang disebut KRPL untuk optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, utamanya melalui pemanfaatan berbagai inovasi yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian. Program M-KRPL/KRPL telah diangkat menjadi program nasional, pada tahun 2011 setiap BPTP mengembangkan 1-2 lokasi, dan pada tahun 2012 ini rata-rata replikasi dilakukan untuk 4 lokasi pada masing-masing provinsi. Sementara itu, beberapa provinsi telah menganggarkan pengembangan KRPL 2-3 kelompok/desa perkabupaten dengan mengacu percontohan M-KRPL yang diinisiasi oleh BPTP. Namun mengingat bahwa konsep M-KRPL dan KRPL hanya didasarkan pada satu uji coba yang sangat kecil skalanya, maka upaya untuk terus melakukan evaluasi demi perbaikan konsep dan implementasi M-KRPL dan KRPL secara terus menerus harus dilakukan agar program ini dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Tujuan penulisan makalah ini adalah : (1) Melakukan tinjauan historis terhadap program-program pemanfaatan pekarangan; (2) Mengidentifikasi Payung Hukum Kebijakan Pengembangan M-KRPL/KRPL; (3) Melakukan tinjauan konseptual terhadap kebijakan dan program pengembangan M-KRPL/KRPL; (4) Mengidentifikasi kendala-kendala pokok pengembangan M-KRPL/KRPL; dan (5) Memberikan alternatif penyempurnaan konsep M-KRPL dan strategi replikasi pengembangan KRPL.

KAJIAN HISTORIS KINERJA PROGRAM PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN DAN DIVERSIFIKASI PANGAN

Menurut arti katanya, pekarangan berasal dari kata *rw* yang berarti halaman rumah (Poerwadarminto, 1976). Oleh

masyarakat di Jawa istilah *ikarangò* lebih dikenal dengan istilah *ikarang kitriò*. Sedangkan secara lebih luas, Terra (1949) memberikan batasan pekarangan adalah tanah di sekitar perumahan, kebanyakan berpagar keliling, dan biasanya ditanami padat dengan beraneka macam tanaman semusim maupun tanaman tahunan untuk keperluan sendiri sehari-hari dan untuk diperdagangkan. Pekarangan kebanyakan saling berdekatan, dan bersama-sama membentuk kampung, dukuh, atau desa.

Danoesastro (1978) memberi batasan pekarangan adalah sebidang tanah darat yang terletak langsung di sekitar rumah tinggal dan jelas batas-batasannya, ditanami dengan satu atau berbagai jenis tanaman dan masih mempunyai hubungan pemilikan dan atau fungsional dengan rumah yang bersangkutan. Selanjutnya dikemukakan bahwa hubungan fungsional yang dimaksudkan di sini adalah meliputi hubungan sosial budaya, hubungan ekonomi, serta hubungan biofisika. Struktur Vegetasi Pekarangan sering ditanami tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman obat keluarga (TOGA), Tanaman Hias. Ekosistem sekitar pekarangan, kadang juga digunakan untuk pemeliharaan hewan ternak dan ikan, biasanya jenis unggas, kambing atau sapi, serta ikan. Lingkungan pekarangan juga menyediakan hijauan pakan untuk ternak besar maupun ternak kecil dan menghasilkan kotoran yang bisa menjadi pupuk organik di lahan pekarangan.

Malik dan Saenorig, (1999) dalam Yusuf (2011) mengungkapkan usahatani pekarangan mempunyai beberapa karakteristik khas sebagai berikut : (1) Adanya saling keterikatan diantara subsistem tanaman pangan, hortikultura semusim, subsistem tanaman tahunan, serta subsistem peternakan dan subsistem perikanan; (2) Mencapai produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan tanpa mengabaikan aspek-aspek pekarangan lainnya yaitu sosial kultural, nutrisi dan kesehatan, ekonomi, ekologi dan keindahan; (3) Melibatkan seluruh anggota keluarga sehingga biasanya faktor produksi tenaga kerja seringkali tidak diperhitungkan. Pengawasan dan pengelolaan umumnya dilakukan oleh kaum ibu yang secara inti lebih banyak waktunya berada di wilayah pekarangan.

Optimalisasi potensi lahan pekarangan dalam menopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat, Danoesastro (1978) dalam Mardikanto (1994), mengemukakan perlunya program yang terencana dalam bentuk

Program Pekarangan Terpadu. Program pemanfaatan lahan pekarangan baru secara eksplisit dimasukkan menjadi bagian dalam Proyek Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) sejak Tahun Anggaran 1991/1992 (Ashari *et al.*, 2012). Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dalam Program DPG dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu gizi makanan masyarakat dengan memanfaatkan persediaan bahan makanan setempat dan mendukung perbaikan gizi keluarga (Rachman *et al.*, 1996).

Hasil penelitian yang dilakukan Budiningsih (2009) tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap diversifikasi konsumsi pangan non beras di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menunjukkan bahwa keragaman konsumsi pangan penduduk belum sempurna. Hal tersebut ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) di empat lokasi penelitian yang masih di bawah skor standar PPH (100), yaitu Kecamatan Kaliangkrik sebesar 61,6; Kecamatan Windusari 71,5; Kecamatan Pakis 66,4 dan Kecamatan Kajoran 70,1. Konsumsi pangan pada kelompok padi-padian telah mengarah pada diversifikasi pangan non beras mengingat pola konsumsi masyarakat di lokasi penelitian lebih didominasi oleh jagung sebagai salah satu pangan substitusi pangan lokal non beras. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap diversifikasi konsumsi pangan adalah variabel pengetahuan pangan, kandungan gizi, harga bahan pangan, pendapatan, aksesibilitas, kebiasaan, pendidikan, dan pertimbangan membeli bahan makanan. Faktor yang paling berpengaruh adalah harga bahan pangan. Artinya harus mampu menghasilkan bahan pangan sumberdaya lokal dan produk olahannya yang memenuhi aspek jenis, kuantitas dan kualitas dengan harga yang kompetitif. Dalam hal ini pengembangan tepung komposit berbasis pangan lokal bukan beras dan terigu (*kanrasgu*) menjadi pilihan yang tepat.

Diversifikasi pangan dan diversifikasi produksi bahan pangan merupakan salah satu kata kunci yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah ketergantungan pangan terhadap pangan beras dan terigu. Rusastra, *et al* (2005) mengemukakan bahwa dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat, selain ditempuh melalui pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan, juga dapat dilakukan melalui diversifikasi konsumsi pangan. Komoditas potensial yang dapat

menjadi bahan pangan pokok sangat beragam di antaranya biji-bijian (jagung, sorgum), umbi-umbian (ubikayu, ubijalar, ganyong, garut, gadung, talas/mbote, suweg), dan palma (sagu). Persoalan komoditas pokok alternatif ini adalah tidak siap olah dan atau mudah rusak (Bantacut, 2008; Ditjen P2HP, 2012). Penanganan dalam jumlah (volume) besar sulit dilakukan sehingga perlu diolah menjadi bentuk antara yang mudah ditangani (simpan dan distribusi) dan diolah (masak untuk siap saji). Bentuk antara yang ideal adalah tepung karena mudah ditangani (simpan dan angkut), mudah diperdagangkan (timbang dan kemas), serta dapat diolah menjadi beragam pangan pokok dan jajanan. Pengolahan ubi jalar segar menjadi tepung dapat meningkatkan penyimpanan dan meningkatkan pemanfaatannya, sebagai bahan baku untuk industri berbagai makanan, termasuk kue dan cookies (Antarlina 1994).

Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumberdaya lokal untuk mengurangi konsumsi beras dilakukan melalui upaya (DKP, 2012) : (a) Internalisasi penganekaragaman pangan melalui kampanye, sosialisasi, dan promosi di berbagai media masa baik itu media cetak, media elektronik, maupun media lainnya; (b) Pengembangan dan atau pengintegrasian KRPL pada kawasan P2KP dan kawasan lain di seluruh wilayah Indonesia; dan (c) Pengembangan penganekaragaman pangan, sebagai sumber pemenuhan karbohidrat dan upaya perbaikan gizi masyarakat dengan mengembangkan sumber daya pangan lokal untuk menumbuhkan ekonomi produktif dan kesempatan kerja.

Gema pemanfaatan lahan pekarangan kembali menguat pada tahun 2010 yaitu saat Kementerian Pertanian RI menggalakkan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). P2KP dimaksudkan untuk (Rana, 2012) : (1) Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, vitamin dan mineral; (2) Meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan terigu; dan (3) Meningkatkan motivasi dan partisipasi serta perubahan pola pikir masyarakat dalam menerapkan pola makan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Sasaran P2KP adalah meningkatkan Skor PPH sebesar 93,3 Tahun 2014 melalui peningkatan konsumsi sumber protein hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah, serta

mengurangi konsumsi beras masyarakat Indonesia sebesar 1,5 persen per tahun (melalui pengembangan umbi-umbian lokal), yang saat ini baru turun 0,6 persen per tahun.

Gerakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan P2KP berbasis sumberdaya lokal, strategi dilakukan melalui (Suryana, 2012) : (1) Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan melalui advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA), serta melalui pendidikan konsumsi pangan B2SA baik pendidikan formal maupun non formal; dan (2) Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal melalui fasilitasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pangan lokal dan advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan. Selanjutnya untuk mendukung P2KP, melalui Direktorat Jenderal Hortikultura dilaksanakan Gerakan Perempuan untuk Optimalisasi Pekarangan (GPOP). Tujuan gerakan ini lebih difokuskan untuk memberdayakan perempuan perkotaan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Komoditas utama yang akan dioptimalkan dalam GPOP adalah cabai keriting, cabai rawit, sayuran, tanaman obat dan tanaman hias.

Program-program berbasis pekarangan telah dikembangkan sejak dahulu, namun sejauh ini belum dijumpai adanya program yang dinilai berhasil secara luas. Terkait dengan seberapa besar dampak pemanfaatan lahan pekarangan, diduga karena belum banyak melakukan studi yang secara eksplisit dan kuantitatif, misalnya melihat peran pekarangan bagi produksi pangan atau pendapatan keluarga. Sebagian besar studi hanya mengemukakan tentang manfaat dan kontribusi dari lahan pekarangan secara kualitatif. Salah satu manfaat terpenting dari fungsi pekarangan adalah untuk menyediakan kebutuhan pangan dan gizi keluarga dengan cara ditanami berbagi jenis tanaman dalam upaya meningkatkan keragaman pangan keluarga (Novitasari, 2011). Manfaat pemanfaatan lahan pekarangan dikemukakan oleh Sayogya (1994) menyatakan bahwa pekarangan disebut juga sebagai lumbung hidup, warung hidup, dan apotik hidup. Selanjutnya Terra *dalam* Penny dan Ginting (1984), mengemukakan bahwa dari hasil penelitian di perdesaan Jawa bahwa seringkali hasil per satuan luas dari pekarangan melebihi hasil per satuan luas dari sawah dan tegal.

Dampak program pemanfaatan lahan pekarangan yang cukup lengkap dikemukakan

oleh Saptana *et al* (2011) dari hasil kajian di Pacitan. Beberapa dampak positif dari kegiatan M-KRPL diantaranya: (a) Meningkatkan konsumsi energi dan konsumsi protein bagi rumah tangga petani peserta secara nyata. Selain itu, M-KRPL telah meningkatkan konsumsi pangan dan peningkatan skor PPH sebesar 11,90-20,46 persen; (b) Mengurangi pengeluaran untuk konsumsi pangan; (c) Meningkatkan pendapatan RT peserta program sebesar 6.81 persen; dan (d) Merangsang tumbuhnya ekonomi produktif di perdesaan.

Hasil penelitian Saptana *et al* (2012) di Kabupaten Karawang, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) bahwa Program M-KRPL memberikan dampak: (a) Program M-KRPL telah dapat mengurangi pengeluaran untuk konsumsi pangan, dan pengurangan pengeluaran kelompok pangan terbesar secara berturut-turut adalah kelompok pangan sayur-sayuran, umbi-umbian, serta produk hasil ternak (telur ayam) dan ikan (ikan lele); (b) Program M-KRPL berdampak meningkatkan produksi khususnya untuk kelompok komoditas sayuran, tambahan konsumsi yang berasal dari produksi M-KRPL walaupun belum mengubah pola konsumsi; (c) Pengembangan M-KRPL telah berdampak meningkatkan PPH, Skor PPH tertinggi dimiliki di Desa Mulyasari, Karawang (peserta program 73,37 dan bukan peserta program 76,84), menyusul di Desa Duwet, Magetan (74,88), sedangkan warga Kesetnana dan Boentuka, TTS skornya sebesar (peserta program 83,92 dan bukan peserta program 74,88). Skor tersebut masih di bawah sasaran yang ditetapkan Jawa Barat yaitu sebesar 88,1 dan 89,1 untuk NTT. Secara nasional, skor PPH yang ingin dicapai ditetapkan sebesar 88 (BKP, 2010).

Program pemanfaatan lahan pekarangan merupakan salah satu implementasi dari Program Pengentasan kemiskinan dan Pemberdayaan Keluarga melalui peningkatan gizi dan pendapatan. Pada tahun 2010, Dinas Pertanian Jawa Timur mencanangkan program Rumah Hijau (Dinas Pertanian Jatim, 2011). Selanjutnya Rumah Hijau ini dikembangkan dan disempurnakan Badan Litbang Pertanian dengan membangun M-KRPL di Kabupaten Pacitan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Ketahanan Pangan Provinsi mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (Rumah Hijau Plus-Plus) yang dilaksanakan tahun 2012. Pengembangan M-KRPL (Rumah Hijau Plus-Plus) merupakan gerakan dari dan untuk masyarakat perdesaan mulai tingkat dusun sampai dengan tingkat rumah

tangga bekerjasama dengan ibu-ibu Tim Penggerak PKK mulai tingkat propinsi sampai dengan Dasa Wisma, instansi pemerintah lebih diarahkan pada tindakan motivasi, fasilitasi, stimulasi dan stabilisasi gerakan tersebut. Rumah Hijau plus-plus akan memanfaatkan lahan pekarangan, lahan-lahan milik desa, kanan kiri jalan desa dan fasilitas penunjang dengan pengembangan tanaman sumber karbohidrat, protein, vitamin dan tanaman *cash crop* (tanaman penghasil uang seperti: pisang, pepaya, belimbing, sayuan, rosella, tanaman hias), ternak dan ikan yang hasilnya dapat dikonsumsi untuk menambah gizi keluarga dan menambah pendapatan keluarga (BKP Jatim, 2011).

Hasil kajian *review* yang dilakukan Ashari *et al* (2012) terhadap optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan diperoleh beberapa temuan pokok : *pertama*, pada masyarakat perdesaan pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan, sayur-sayuran maupun buah-buahan sudah berlangsung sejak lama dan terus berkembang hingga sekarang. Karakteristik dari pemanfaatan lahan pekarangan umumnya masih bersifat sambilan (mengisi waktu luang) dan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Dalam konteks memperkuat ketahanan pangan nasional yang berbasis pada ketahanan pangan rumah tangga, lahan pekarangan dapat memainkan peran yang cukup signifikan.

Kedua, untuk meningkatkan pendapatan petani dan menjaga keberlanjutan usaha di lahan pekarangan, perlu dilakukan pembaruan rancangan pemanfaatan pekarangan dengan memperhatikan berbagai program yang telah berjalan seperti Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG), Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), dan Gerakan Perempuan Optimalisasi Pelebaran (GPOP) dan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL). MKRPL dipandang dari aspek muatan dan inovasi teknologi dipandang sudah cukup memadai, namun masih lemah dari aspek penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat petani. Inovasi teknologi serta sarana dan prasarana yang dibangun seyogyanya dapat meningkatkan produksi dan selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan petani.

Ketiga, dari pengalaman program sebelumnya, terutama dalam rangka ketahanan pangan seperti Program *Participatory Integrated Development in Rainfed Areas* (PIDRA), *Special Program for Food Security*

(SPFS), dan Program Desa Mandiri Pangan (Desa Mapan), nampak jelas terlihat bahwa keberhasilan program-program akan terwujud jika melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu kata kunci lain keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut adalah dilakukan melalui pendekatan kelompok. Oleh karena itu, apapun nama dan bentuk program pemanfaatan lahan pekarangan yang sedang dan akan dilaksanakan tidak dapat mengabaikan pendekatan kelompok untuk meraih keberhasilan dan keberlanjutan program.

Hal yang harus dipahami oleh perancang dan pelaksana program pembangunan pertanian adalah bagaimana petani memaknai realitas berorganisasi melalui berbagai kelembagaan lokal yang ada. Perbedaan pemaknaan tentang organisasi antara petani dan perancang pembangunan dapat menghambat keberhasilan program. Realitas berorganisasi bagi petani diungkapkan (Syahyuti, 2012) : (1) Organisasi sebagai wadah untuk berinteraksi dengan pemerintah, secara empiris diketahui bahwa hanya petani-petani yang mengikatkan diri melalui kelembagaan kelompok tani atau Gapoktan yang diperhatikan pemerintah; (2) Prosedur yang harus dipenuhi untuk dapat mengakses bantuan pemerintah, seperti untuk mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi maka kelompok tani dan Gapoktan harus menyusun RDK dan RDKK; (3) Sebagai jalan untuk terlibat dalam pembangunan, kesediaan masuk menjadi anggota keorganisasian petani dipersepsikan sebagai sebuah bentuk kesediaan terlibat dalam pembangunan; (4) Agar dianggap sebagai masyarakat yang partisipatif, sebutan ini merupakan kebanggaan kolektif; dan (5) Untuk mengolektifkan kegiatan, terutama dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran secara bersama-sama.

PAYUNG HUKUM KEBIJAKAN DAN PROGRAM M-KRPL DAN KRPL

Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan sebagai Dasar Kebijakan M-KRPL

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dalam pasal 46 dikemukakan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah menyelenggarakan, membina dan atau mengkoordinasikan segala

upaya untuk mewujudkan cadangan pangan nasional. Lahirnya konsep dan kebijakan M-KRPL dilatarbelakangi oleh upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga melalui optimalisasi lahan pekarangan untuk tanaman pangan berbasis sumberdaya lokal, hortikultura, peternakan, dan perikanan.

Ketahanan pangan nasional harus dimulai dari ketahanan pangan rumah tangga. Ketahanan pangan rumah tangga menurut UU No. 7 Tahun 1996 adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan, yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Definisi ketahanan pangan menurut FAO (2001) adalah *when all people, at all times, have physical and economic acces to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary need and food preferences for an active and healthy life.*

Indonesia pada tahun 2012 memiliki jumlah penduduk yang besar (lebih dari 250 juta jiwa) sehingga permasalahan pangan pokok sangat serius. Isu strategis ketahanan pangan terkait persoalan berikut: (1) Terjadinya peningkatan kebutuhan terhadap pangan karena pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah penduduk kelas menengah sehingga terjadi peningkatan jumlah konsumsi yang lebih besar; (2) Terjadi kompetisi antara hasil pertanian untuk sumber bahan pangan dan sumber energi; (3) Pentingnya swasembada pangan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kerentanan dan kerawanan pangan di daerah; dan (4) Terjadi degradasi sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan akibat penggunaan sumberdaya pertanian yang tidak ramah lingkungan (BKP Banyu Asin, 2012). Pengembangan konsep dan kebijakan M-KRPL dan replikasi KRPL diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam memecahkan persoalan diatas, terutama dari aspek penyediaan pangan, menjaga swasembada pangan berkelanjutan, dan dalam pelestarian sumber plasma nutfah berbasis lahan pekarangan.

Kebutuhan pangan pokok ini terutama dipenuhi dengan beras bahkan penduduk yang sebelumnya tidak mengkonsumsinya dikonversio menjadi konsumen beras. Hasil kajian Ariani dan Purwantini (2007) mengungkapkan bahwa konsumsi energi yang berasal dari pangan nabati mencapai sekitar (94%) dan tertinggi berasal dari kelompok padi-padian (79%). Selanjutnya hasil kajian Ariani (2010) mengungkapkan dalam kurun waktu 2005-2009, konsumsi beras menurun tetapi diikuti kenaikan konsumsi terigu. Pergeseran yang

diharapkan adalah penurunan konsumsi beras dengan kenaikan konsumsi sumber karbohidrat pangan lokal lainnya seperti umbi-umbian, sukun, dan sagu, namun hingga kini belum terwujud. Hasil kajian Sumaryanto (2009) mengungkapkan bahwa bahan pangan sumber karbohidrat yang cukup mencolok adalah terigu di mana kontribusinya sebagai sumber karbohidrat sebesar (14,2%). Sumber karbohidrat terigu cukup besar, bukan produksi lokal, juga membawa persoalan ekonomi dan menguras devisa negara. Ketergantungan pada komoditas ini membawa banyak persoalan, mulai dari pengadaan hingga distribusi yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional secara keseluruhan.

Suryana (2012) mengungkapkan konsumsi beras perkapita telah mengalami penurunan, pada tahun 2002 tingkat konsumsi beras sebesar 107,71 kg perkapita/tahun dan pada tahun 2011 hanya berkisar antara 98,50-102,82 perkapita/tahun. Dikemukakan bahwa pangsa angka kecukupan gizi (AKG) secara berturut-turut adalah padi-padian (61,8%), minyak dan lemak (10,2%), pangan hewani (8,4%), sayur dan buah (4,2%), gula (4,1%), umbi-umbian (2,6%), kacang-kacangan (2,8%), buah atau biji berminyak (1,7%), lain-lain (1,9%). Berdasarkan indikator PPH Ideal, maka kelompok pangan yang masih mengalami kekurangan adalah umbi-umbian, Pangan Hewani, kacang-kacangan, serta buah dan sayur. Berdasarkan kondisi yang dihadapi tersebut, maka pengintegrasian Program Ketahanan dengan Program M-KRPL dan KRPL memiliki peran strategis dalam menurunkan konsumsi beras, meningkatkan konsumsi umbi-umbian lokal, serta meningkatkan konsumsi hasil ternak dan ikan.

Salah satu jenis umbi-umbian lokal yang memiliki keunggulan sebagai sumber karbohidrat dan memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi berbagai produk olahan adalah ubikayu (*cassava*). Beberapa kelebihan yang dimiliki antara lain adalah : (a) dapat tumbuh pada kondisi tanah yang kurang subur (tanah masam) dan iklim yang ekstrim, (b) mampu berproduksi tinggi pada tanah yang subur, tetapi tetap menghasilkan pada tanah yang kurang atau tidak subur, (c) rentang panen yang panjang yakni antara 10 hingga 30 bulan (dapat disimpan di kebun), (d) merupakan makanan pokok terbesar dunia setelah gandum, beras dan jagung, (e) sumber terbesar karbohidrat, (f) sekitar 500 juta orang bergantung pada usahatani ubikayu, dan (g) memiliki umbi manis dan pahit (Laswai, *et al.*, 2006). Jenis komoditas umbi-umbian lain yang

potensial yang dapat menjadi bahan pangan pokok ubijalar, ganyong, gadung, *arrow root* (PPHP, 2011). Namun dalam program M-KRPL/KRPL kelompok komoditas ini belum mendapatkan prioritas BPTP dan perhatian masyarakat karena dipandang inferior. Persoalan komoditas ini adalah tidak siap olah dan atau mudah rusak. Penanganan dalam jumlah (volume) besar sulit dilakukan sehingga perlu diolah menjadi bentuk antara yang mudah ditangani (simpan dan distribusi) dan diolah (masak untuk siap saji). Bentuk antara yang ideal adalah tepung karena mudah ditangani (simpan dan angkut), mudah diperdagangkan (timbang dan kemas), serta dapat diolah menjadi beragam pangan pokok dan jajanan.

Sebagai negara agraris yang subur dan luas, Indonesia kaya sumber karbohidrat yang dapat mencukupi kebutuhan pangan pokok. Diversifikasi pangan adalah pilihan yang tepat untuk lepas dari ketergantungan terhadap beras dan terigu sehingga persoalan ekonomi, sosial bahkan politik pangan dapat dikurangi (PPHP, 2011). Keragaman pangan juga membantu pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal yang berarti menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif pada masyarakat perdesaan. Dampak positif yang dapat dihasilkan adalah di satu sisi kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara baik dan aman, di sisi lain dapat menggerakkan perekonomian lokal dan nasional.

Pentingnya pengembangan Program M-KRPL/KRPL memiliki landasan ideologi yang kuat, yaitu: ideologi ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan (Arifin, 2012). Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan tingkat individu, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta sesuai dengan keyakinan, dan budaya, untuk mendapatkan hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Revisi UU No. 7/1996). Kemandirian pangan adalah kemampuan memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat individu, baik jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal (UU No. 41/Tahun 2009). Sementara itu, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan

hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal (UU No. 41/Tahun 2009).

Payung Hukum Pengembangan M-KRPL

Tidak ada bagian yang menjelaskan dasar hukum pengembangan program M-KRPL. Mengingat bahwa program M-KRPL lahir dilatarbelakangi upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar hukumnya adalah: UU No.7 tahun 1966 tentang Pangan, yang saat ini dalam proses revisi; PP No.68 tentang Ketahanan pangan; PP No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; serta PP No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Perpres No 22 Tahun 1999 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal pada dasarnya berisikan: (1) Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal menjadi acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2); (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Perpres ini diatur melalui Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen, Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing; (3) Perumusan kebijakan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan; (4) Evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.

Tujuan P2KP antara lain adalah (Suryana, 2012) : (1) Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, vitamin dan protein; (2) Meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan terigu; dan (3) Meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dan anak usia dini dalam penganekaragaman konsumsi pangan. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (P2KP) dimaksudkan untuk mengurangi kon-

sumsi beras masyarakat Indonesia yang saat ini baru turun 0,6 persen per tahun, masih jauh dari target penurunan yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,5 persen per tahun dan meningkatnya Skor PPH sebesar 93,3 Tahun 2014.

TINJAUAN KONSEPTUAL TERHADAP KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN M-KRPL

Kebijakan dan Program M-KRPL

Tinjauan konsep kebijakan dan program pengembangan M-KRPL/KRPL dilakukan melalui studi literatur terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan M-KRPL antara lain: (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; (3) Sidang Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan Konferensi Dewan Ketahanan Pangan (DKP); (4) Pedoman Umum Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, tahun 2011; serta (5) Dokumen lainnya adalah paparan/naskah/makalah oleh pejabat terkait dalam seminar/lokakarya/workshop terkait M-KRPL dan pengembangannya.

Analisis konsepsi difokuskan pada latar belakang mengapa kebijakan itu dilahirkan. Bagaimana pemikiran yang mendasari program untuk memecahkan permasalahan? Apakah pemikiran itu konsisten dengan tujuan program? Apakah program itu dapat diduga akan berhasil atau gagal? Kalau gagal, kira-kira apa penyebabnya? Bagaimana agar program yang dintroduksikan dapat berjalan secara berkelanjutan?

Presiden Republik Indonesia (RI) pada acara Konferensi Dewan Ketahanan Pangan di *Jakarta International Convention Centre* (JICC) pada bulan Oktober 2010, menyatakan bahwa ketahanan dan kemandirian pangan nasional harus dimulai dari tingkat rumah tangga (Pedum M-KRPL, 2011). Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan rumah tangga merupakan salah satu alternatif kebijakan untuk mewujudkan kemandirian pangan. Sesuai arahan Presiden RI saat peluncuran (*grand launching*) KRPL di Pacitan pada 13 Januari 2012 bahwa Program KRPL

harus dikembangkan di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian menginstruksikan Program M-KRPL dikembangkan melalui BPTP di seluruh kabupaten/kota. Hal inilah yang melatarbelakangi dasar pemikiran kebijakan dan program M-KRPL.

Prinsip dasar KRPL pada tahapan dewasa ini, mencakup 8 (delapan) aspek, yaitu: (1) Ketahanan dan kemandirian pangan rumah tangga; (2) Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal; (3) Konservasi sumberdaya genetik untuk masa depan; (4) Peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat; (5) Pendidikan dan pelatihan terhadap kelompok sasaran; (6) Kesehatan dan gizi masyarakat; (7) Pentingnya permodalan dan pasar, serta (8) Antisipasi terhadap perubahan iklim (BBP2TP, 2012). Suryana (2012) mengemukakan bahwa kelompok sasaran adalah kelompok wanita, minimal 10 rumah tangga per desa.

Pengembangan M-KRPL memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan dalam jangka pendek adalah : (1) Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari; (2) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di perkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah tangga mejadi kompos; (3) mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan; (4) Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri. Tujuan jangka panjang meliputi : (1) Kemandirian pangan keluarga; (2) Diversifikasi pangan untuk masa depan; (3) Kelestarian pangan untuk masa depan; dan (4) Peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat (Badan Litbang Pertanian, 2011).

Kebijakan dan program KRPL memperhatikan pendekatan kawasan dan kelestarian. Melalui pendekatan kawasan yang terkonsentrasi dalam satu wilayah administratif (RT, dusun/kampung, desa) dapat dilakukan pelayanan dan bimbingan secara lebih baik. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahatani sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pezzey (1992) melihat aspek

keberlanjutan atau kelestarian dari aspek statik dan dinamik : (1) Keberlanjutan statik diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan; dan (2) Keberlanjutan dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang senantiasa terus berubah. Menurut Heal (1998), konsep keberlanjutan atau kelestarian dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu : (1) dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang; dan (2) dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumberdaya alam dan lingkungan.

Badan Litbang Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) pada tahun 2011 mengembangkan M-KRPL di 112 kawasan pada setiap kabupaten/kota, diperkirakan pada tahun 2012 sudah terdapat (70%) dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia yang telah mengimplementasikan Program KRPL (BBP2TP, 2012). Untuk menjamin keberlanjutan program maka Badan Litbang Pertanian melalui BPTP di masing-masing provinsi mengembangkan Kebun Bibit Induk (KBI) dan Kebun Bibit Desa (KBD) sehingga ketersediaan benih/bibit yang memenuhi aspek jenis, jumlah, kualitas, serta kontinuitas pasokannya.

Implementasi Program M-KRPL dan Perkembangannya

Hasil kajian Husein Sawit (2012) tentang penumbuhan atau penguatan kelembagaan KRPL atau KRPL yang berkelanjutan diperoleh *lesson learned* dari Pacitan, antara lain adalah : *pertama*, kegiatan KRPL sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pada awalnya program ini didominasi dengan pendekatan *top down* dalam perkembangannya sudah mulai berkembang secara swadaya di beberapa tempat secara terbatas. Dengan berbagai kekurangan dan keterbatasannya, KRPL berpotensi untuk terus dikembangkan dengan beberapa penyempurnaan, serta penyesuaian dengan kondisi dan situasi biofisik, sosial dan ekonomi.

Kedua, ketersediaan benih/bibit Kebun Bibit Desa (KBD), menjadi kunci sukses keberhasilan Program KRPL pada tahap awal dan menjaga keberlanjutannya. Peran wanita lebih dominan dalam mengelola budidaya tanaman, ternak dan ikan. Tenaga pria dewasa dan tenaga kerja muda umumnya bermigrasi ke kota. Kelompok Ibu-Ibu PKK ini saat ini telah berhasil mengembangkan Kebun Bibit di

tingkat RT (KBRT) yang lebih dapat menjamin kebutuhan anggota terhadap kebutuhan bibit sayuran.

Ketiga, produksi sayuran dan buah yang berlebih untuk mencukupi kebutuhan keluarga terkendala dalam pemanfaatannya. Diperlukan inovasi untuk penanganan pasca panen, pengolahan, penyimpanan, dan atau pemasaran baik dalam bentuk segar maupun olahan. Pengembangan inovasi untuk pengolahan komoditas haruslah mempertimbangkan kesesuaian tenaga kerja wanita sehingga bersifat tepat guna.

Keempat, peran BPTP Jawa Timur sangat intensif dalam implementasi Program M-KRPL di Desa Kayen, Kecamatan Pacitan sebagai kawasan model percontohan. Keterlibatan intensif ini tidak saja berpengaruh positif, namun, perlu pula ada batasannya. BPTP perlu merancang *exit strategy*, dengan menetapkan sejumlah indikatornya, agar program ini berkelanjutan. Perlu kesepakatan dengan Pemerintah Daerah dalam hal batasan waktu dan pembagian tugas yang jelas antara BPTP dengan Dinas Teknis terkait. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebaiknya fokus pada kegiatan pengkajian/penyedia teknologi tepat guna untuk skala rumah tangga, sedangkan pendampingan sebaiknya dilakukan oleh Dinas Teknis Pemerintah Daerah setempat, seperti Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Dinas Perikanan.

Kelima, disamping kekuatan dan keberhasilan, berikut disarikan juga kelemahannya: (a) Pada tahap awal/program dirancang minimal harus dipahami tentang karakteristik sosial ekonomi rumah tangga; (b) Terlalu terfokus terhadap kebutuhan pangan/gizi dalam rumah tangga, namun kurang memperhatikan aspek peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah; (c) Areal kawasan KRPL sangat terbatas, hanya sejumlah RT/kawasan yang berada dekat dengan jalan raya; (d) Cukup baik untuk kampanye program, namun belum menyentuh wilayah di mana konsentrasi penduduk miskin yang berisiko tinggi terhadap kerawanan pangan dan gizi.

Implementasi kegiatan Program M-KRPL dilaksanakan melalui (Suryana, 2012) : (a) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan anggota kelompok (tanaman sayuran dan buah, ternak kecil dan ikan); (b) Pengembangan Kebun Bibit Desa (KBD); dan (c) Pengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan melalui bantuan alat pengolahan skala rumah tangga. Selanjutnya dianjurkan

adanya integrasi Program KRPL dengan Program P2KP, di mana KRPL dengan KBD-nya, sementara itu P2KP dengan pengembangan pangan lokal, menu makanan yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman (B2SA), pengembangan kantin dan kebun sekolah. Peintegrasian kedua program tersebut harus dilakukan melalui program pendampingan.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) melakukan Pengembangan Program Rumah Pangan Lestari (RPL) pada Kawasan P2KP. Tujuannya adalah : (a) Membangun gerakan pemanfaatan pekarangan tingkat kabupaten menjadi satu kawasan yang kompak; (b) Menyediakan pangan yang lebih komersial di samping untuk memenuhi kebutuhan keluarga; (c) Mengembangkan pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat (Rana, 2012).

Lokasi pengembangan mencakup 32 kabupaten/kota pada tahun 2012, dari satu kabupaten/kota di pilih 2 desa masing-masing lima kelompok wanita. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup: (a) Membuat demplot pekarangan secara lengkap (sayur, buah, toga, umbi-umbian, kolam ikan, kandang ayam/itik); (b) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan seluruh anggota kelompok; (c) Membangun Kebun Bibit Desa (KBD); (d) Pengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; (d) Sosialisasi KRPL pada kawasan P2KP bagi siswa usia dini (SD/MI) melalui pengembangan kantin sekolah dan kebun sekolah; (e) Pendampingan oleh Tim Penyuluh pendamping desa P2KP, BPTP dan instansi terkait.

Sinergi Program KRPL pada Kawasan P2KP mencakup : (a) Lokasi, di mana pengembangan Program KRPL di Kawasan yang sebelumnya telah dikembangkan Program P2KP; (b) Pengembangan Kebun Bibit Desa (KBD), yang dalam Program P2KP belum dikembangkan; (c) Pendampingan dan pemberdayaan kelompok, khususnya kelompok Ibu-Ibu PKK dan dasa wisma; (d) Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah; dan (e) Melakukan kegiatan kampanye, promosi, dan diseminasi Program KRPL pada Kawasan P2KP.

Berdasarkan hasil kajian kegiatan M-KRPL di Kabupaten Pacitan dan Magetan, Jawa Timur; Kabupaten Karawang, Jawa Barat; dan Timor Tengah Selatan, Nusa

Tenggara Timur yang dilakukan oleh Saptana *et al* (2012) diperoleh beberapa temuan pokok. Tahap persiapan, terdiri atas kegiatan : (a) Pengumpulan data dan informasi tentang potensi sumberdaya lahan, potensi desa, dan kelembagaan lokal (PKK, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Tani); (b) Pertemuan dengan dinas teknis terkait (BKP Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, KCD, BPP, dan Penyuluh) untuk mendapatkan kesepakatan dalam penentuan calon kelompok sasaran dan lokasi; (c) Koordinasi dengan Dinas Pertanian dan dinas terkait lainnya di tingkat kabupaten; (d) Memilih pendamping kelompok sasaran yang menguasai teknik pemberdayaan masyarakat sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Pembentukan atau penguatan kelompok. Kelompok sasaran adalah rumah tangga atau kelompok rumah tangga dalam satu rukun tetangga atau rukun warga yang dinilai memiliki partisipasi tinggi. Kelompok sasaran untuk lokasi contoh Kabupaten Pacitan dan Magetan, Jawa Timur serta Karawang, Jawa Barat sebagian besar adalah kelompok ibu-ibu PKK, Dasa Wisma, Kelompok Wanita Tani, dan Koperasi Wanita Tani. Sementara itu, di Kabupaten Timor Tengah Selatan menggunakan kelembagaan Kelompok Tani/Gapoktan dan Kelembagaan PKK. Semua kelembagaan tersebut di lokasi-lokasi penelitian sudah eksis dan cukup dinamis, sehingga kegiatan yang dilakukan cenderung bersifat penumbuhan dan penguatan kelembagaan lokal yang telah ada.

Sosialisasi program, sosialisasi adalah kegiatan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan untuk kesepakatan awal dan rencana tindak lanjut, kegiatan ini dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Secara umum program-program pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui proses sosial yang matang relatif berhasil dan berkelanjutan. Secara relatif M-KRPL dan replikasinya menjadi KRPL khususnya di lokasi penelitian untuk Kabupaten Pacitan dan Magetan, Jawa Timur sudah dilakukan melalui proses sosialisasi yang cukup matang, sedangkan sosialisasi program di Kabupaten Karawang dan Timor Tengah Selatan tampaknya kurang dilakukan melalui proses sosialisasi yang matang.

Penguatan Kelembagaan, penguatan kelembagaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah, belajar membuat keputusan atau aturan dan mentaatinya, mampu memperoleh manfaat informasi,

mampu bekerjasama dalam kelompok (gotong royong) dan bekerjasama dengan aparat. Penguatan kelembagaan yang dilakukan mencakup aspek manajemen kelompok, manajemen pengelolaan KBD, manajemen administrasi keuangan kelembagaan M-KRPL/KRPL, dan dalam meningkatkan partisipasi anggota.

Perancangan Kegiatan, melakukan rancang bangun pemanfaatan pekarangan (*landscape* pekarangan), menentukan tata letak tananam sayuran, buah-buahan dan obat-obatan, dalam satuan waktu tertentu. Bagaimana mengatur pola pergiliran tanam dan panen. Ke depan juga harus dipikirkan kegiatan pasca panen, pengolahan hasil, kegiatan pemasaran, serta pengembangan kelembagaan kemitraan usaha.

Pelatihan, melakukan kegiatan pelatihan teknis budidaya berbagai jenis komoditas tanaman, pelatihan usaha ternak, pelatihan usaha kolam ikan, pelatihan cara pemanenan, penanganan limbah, dan pembuatan pupuk kompos. Ke depan pelatihan aspek penanganan pascapanen, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil perlu dilakukan. Salah satu aspek penting lagi adalah pelatihan manajemen usaha dan kewirausahaan.

Pelaksanaan, Program M-KRPL/KRPL dilaksanakan oleh masyarakat wanita tani (PKK), kelompok dasa wisma, Kelompok Wanita Tani, Koperasi Wanita Tani. Dalam pelaksanaannya dibaringi dengan pendampingan dari aparat (PPL setempat, Dinas Pertanian, BKP Kabupaten, BPTP) dari tahap penumbuhan, pengembangan hingga sampai kepada tahap mandiri.

Komponen dari M-KRPL/KRPL selain tanaman pangan (umbi-umbian) dan hortikultura (sayuran, buah, dan biofarmaka) juga mencakup komoditas peternakan (unggas: ayam kampung dan itik; ruminansia kecil: kelinci) dan perikanan (ikan air tawar: Ikan Lele, Nila dan Mas). Unggas yang dipilih adalah ayam buras dan itik (dimanfaatkan telur dan daging), Kelinci dan ikan dimanfaatkan dagingnya. Untuk pembuatan kolam ikan disarankan dari terpal karena biayanya lebih murah.

Untuk penanganan pemasaran, sebenarnya Koperasi Wanita (KOPWAN) memiliki kemampuan yang baik untuk menampung berbagai hasil dari pekarangan anggotanya, sehingga dapat dijadikan sebagai tempat pemasaran bersama yang dapat memiliki posisi tawar dibanding pedagang lain. Namun hingga kini penjualan masih melalui pedagang pengumpul desa, selanjutnya pedagang

pengumpul desa ada yang membawa hingga ke kota kabupaten dan kabupaten sekitarnya. Di lokasi penelitian Desa Duwet, Kabupaten Magetan telah dibuat MOU antara PKK atau Kopwan dengan beberapa pedagang pengumpul desa; sedangkan di Desa Kayen, Kabupaten Pacitan dan Desa Mulyasari, Kabupaten Karawang petani menjual melalui pedagang pengumpul desa; sementara itu, di Desa Kesetnana dan Boentuka, Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan penjualan di pasar tradisional setempat atau ke pasar kabupaten. Dengan demikian kedepan diharapkan kelembagaan KOPWAN ke depan tidak sebatas bergerak pada usaha simpan pinjam tetapi juga unit produksi pengolahan hasil dan pemasaran.

Model-Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) di Provinsi Jawa Timur telah direplikasikan menjadi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Pada tahun pertama dan ke dua pengembangan KRPL sepenuhnya didanai oleh BKP Provinsi Jawa Timur dan akan dilepas pada tahun ke-3 (mirip dengan konsep Desa Mandiri Pangan/Desa Mapan).

Tahun pertama, tahap persiapan dan pertumbuhan, mencakup : (1) Pemberdayaan masyarakat; (2) Pengembangan sistem ketahanan pangan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial ekonomi untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (Christenson and Robinson, 1989). Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan M-KRPL/KRPL hanya dapat terwujud apabila anggota dalam masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan.

Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dalam Program M-KRPL/KRPL meliputi : (a) Sosialisasi pengembangan M-KRPL/KRPL mencakup aspek kerangka pikir, strategi pengembangan, tujuan, sasaran, dan output yang diharapkan; (b) Pemberian stimulan, untuk mendukung rencana pengembangan usaha kelompok melalui Kelembagaan PKK dan Kelompok Tani/Gapoktan; (c) Pemanfaatan stimulan tersebut disesuaikan dengan besarnya dana, kondisi agroekosistem setempat, keinginan/kemauan usaha yang dituangkan dalam proposal/RUK/ RUB; (d) Pemanfaatan stimulan tersebut hanya boleh digunakan untuk usaha bidang pertanian secara terpadu (tanaman pangan, ternak dan ikan); dan (e) Dalam rangka pengembangan

kelembagaan, manajemen, dan usaha kelompok difasilitasi dengan kegiatan pembinaan, pendampingan, serta kemitraan dengan swasta.

Pengembangan sistem ketahanan pangan dilakukan dengan : (1) Pengembangan Kebun Benih Desa (KBD), setiap desa KRPL harus mengembangkan KBD untuk memenuhi kebutuhan benih/bibit anggotanya; (2) Pengembangan intensifikasi pekarangan, semua lahan pekarangan, lahan-lahan kosong milik desa, dan kanan kiri jalan diharapkan diusahakan pertanian yang dapat menjadi sumber bahan pangan keluarga; dan (3) Pemanfaatan hasil pekarangan ditujukan untuk konsumsi langsung sebagai sumber bahan pangan keluarga, dilakukan pengolahan hasil untuk dijual dan disumbangkan ke Posyandu sebagai makanan tambahan anak dan balita dan atau makanan pendamping ASI, serta dijual segar setelah sortasi melalui KOPWAN.

Tahun kedua, tahap pengembangan dan pemanfaatan. Koperasi Wanita yang semula sebagai lembaga keuangan desa atau unit simpan-pinjam ditingkatkan fungsinya menjadi unit usaha yang menangani: permodalan, agroinput, dan pemasaran bersama. Ruang lingkup kegiatan pada tahap ini meliputi: (1) Pemberian stimulan, yang semula fokus pada *on-farm* diharapkan dapat mengembangkan diversifikasi usaha *off-farm* dan *non-farm* (pengolahan, pemasaran hasil, tunda jual, kios saprodi); (2) Pemanfaatan stimulan unit pengembangan usaha produktif yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pengembangan; dan (3) Adanya kegiatan pembinaan, pelatihan (keterampilan, kewirausahaan, dan manajemen), pendampingan, perluasan jaringan pasar, dan kemitraan dengan swasta.

Tahun ke tiga, tahap kemandirian. Pada tahap ini pemerintah provinsi tidak lagi memberikan bantuan stimulan. Namun kebutuhan modal untuk pengembangan usaha anggotanya akan difasilitasi dengan menjalin hubungan dengan lembaga perbankan (khususnya Bank UMKM Provinsi Jawa Timur). Koperasi Wanita yang akan melakukan peminjaman ke Bank dan disalurkan ke anggota untuk kegiatan usaha ekonomi produktif.

Peserta program M-KRPL/KRPL akan diikuti dalam acara semacam Sekolah Lapang (SL). Sebelum menerima bantuan harus ada SL terlebih dulu. Pendampingan program juga harus dilatih terlebih dahulu. Ada semacam *Training of Trainer* (TOT) yang melibatkan Petugas Pertanian Kabupaten

(BKP Kabupaten dan Penyuluh Pertanian Lapang) yang diharapkan akan menjadi pelatih bagi yang lainnya (PPL setempat dan Tim Penggerak PKK) dalam hal ini akan bekerjasama dengan BPTP Karang Ploso. Jika semua sudah siap, maka bantuan stimulan baru diluncurkan dan dilakukan kegiatan pelaksanaan lapang.

Hal paling krusial agar program M-KRPL/KRPL dapat berjalan dengan baik adalah adanya seorang tokoh masyarakat sebagai penggerak pembangunan (*agent of development*), yang menyenangi kegiatan pertanian (*hobby*) sehingga kegiatan dapat diakselerasi. Tokoh masyarakat yang umumnya ditaati oleh masyarakat ini bisa menjadi penggerak perubahan (*agent of change*) dan melakukan pembinaan terhadap anggota. Ke depan penggerak masyarakat ini akan lebih solid kalau didampingi sarjana desa yang berlatar belakang pertanian (Sosial Ekonomi Pertanian, Agronomi dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan).

Implementasi M-KRPL Tahun 2011 - 2012, pada Tahun Anggaran 2011 menurut hasil evaluasi BBP2TP (2012) memberikan beberapa temuan pokok: (1) 1 -3 unit M-KRPL/Provinsi; (2) Awalnya (Oktober 2011) telah melibatkan 20 ÷ 100 KK per kawasan; (3) Hingga Maret 2012 telah berkembang menjadi 30 ÷ 250 KK per kawasan; (4) Di Provinsi Jawa Timur telah berkembang di sejumlah desa, kecamatan, dan kabupaten secara meluas, sedangkan di provinsi-provinsi lain cukup beragam; dan (4) Badan Litbang Pertanian telah menginisiasi kerjasama dengan berbagai pihak (BKP, SIKIB, Haryono Suyono Center, PP Salimah).

Implementasi M-KRPL Tahun 2011 - 2012, pada Tahun Anggaran 2012 merefleksikan beberapa hal pokok : (1) Dilaksanakan di 70-100 persen dari jumlah kabupaten per provinsi; (2) Rata-rata melibatkan 20 ÷ 100 KK per kawasan; (3) Per Maret 2012 sudah ada perkembangan rata-rata menjadi 25 ÷ 150 KK per kawasan; (4) Integrasi dan kerjasama dengan berbagai pihak: Pemda, SIKIB, BKP, Haryono Suyono Center, DWP BPS, BNN, MenKUM & HAM, SESKOAD, PP Salimah; (5) Melalui APBD Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan atau mereplikasi M-KRPL (Rumah Hijau Plus-Plus) di 38 Kabupaten/Kota masing-masing 3 Desa/Kabupaten atau Kota, Jawa Barat masih terbatas di beberapa Kabupaten (Karawang, Kuningan, dan Subang), dan NTT sudah mencakup 12 Kabupaten/Kota (2-4 kawasan/desa per kabupaten/kota); dan (6)

BPTP melakukan pendampingan satu desa pada setiap kabupaten/kota.

Eskalasi KRPL pada tahun 2012 melalui implementasi oleh Pemda (APBN/APBD) menunjukkan perkembangan yang menggembirakan (BBP2TP, 2012): (1) Kota Padang memberikan dukungan dana 16 juta/kelurahan; (2) Kota Bengkulu memberikan dukungan 25 juta/kelurahan; (3) Jawa Timur, melakukan pengembangan secara masif dengan dukungan dana sebesar 10 M (38 Kabupaten) masing-masing kabupaten/kota 3 desa; (4) Sulawesi Tengah memberikan dukungan 16 juta/lokasi dengan integrasi dengan P2KP; (5) Sumatera Selatan juga memberikan dukungan dana melalui APBD; dan (6) Jawa Tengah, juga telah memberikan dukungan dana sebesar 1,050 M untuk pengembangan di 8 kabupaten. Program KRPL (Rumah Hijau Plus-Plus) di Jawa Timur pada TA 2012 dilaksanakan pada 114 desa pada 38 kabupaten/kota, pada masing-masing kabupaten/kota dilakukan KRPL pada 3 desa dukungan dana dari APBD Provinsi Jawa Timur, melalui SK Gubernur. Sementara itu, diprovinsi lain dilakukan pada kabupaten/kota yang terbatas dengan jumlah desa 2-4 desa/kabupaten atau kota.

Secara keseluruhan hasil evaluasi kebijakan dan program M-KRPL diperoleh temuan-temuan pokok sebagai berikut : (Saptana *et al.*, 2012) :

1. Keseluruhan tahapan penyusunan konsep pengembangan M-KRPL kurang dilakukan melalui pentahapan-pentahapan dengan matang sebagai mana layaknya program pemberdayaan masyarakat.
2. Pendekatan dalam persiapan, sosialisasi, pembentukan kelompok, penguatan lembaga kelompok, perencanaan, pelatihan, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang, meskipun melibatkan dukungan dari hampir seluruh Puslit dan Balit Teknis.
3. Tujuan pembentukan kelompok masih terbatas pada peningkatan produksi jangka pendek dengan menggunakan teknologi atau intensifikasi sebagai *entry point*, bukan kelembagaan. Penyebabnya adalah membangun suatu kelembagaan jelas jauh lebih sulit dan lama daripada hanya mengintroduksi suatu teknologi.

4. Pembentukan kelompok lebih ditujukan untuk memperkuat ikatan-ikatan horizontal (kelompok wanita tani, PKK beserta dasawisma dan kelompok tani/Gapoktan), namun masih lemah dalam ikatan vertikal dalam perspektif pengembangan jaringan agribisnis.
5. Kelompok dibentuk lebih untuk tujuan memudahkan dalam distribusi bantuan dan memudahkan tugas kontrol dari pelaksana program, belum pada usaha pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan.
6. Bentuk kelompok yang dikembangkan relatif seragam dengan menunjuk kelembagaan PKK/Kelompok Wanita Tani sebagai kelembagaan pengelola M-KRPL/KRPL. Dalam perkembangannya telah melibatkan Kelompok Wanita Tani (Poktan), Kelompok Tani dan Koperasi Wanita Tani (KOPWAN).
7. Pembinaan untuk kelompok dilakukan baik melalui pendekatan individu maupun kelompok, namun masih lemah dalam meningkatkan upaya menggerakkan partisipasi masyarakat.
8. Pengembangan kelompok cenderung menggunakan jalur struktural. Struktur kelompok dibangun lebih dahulu, untuk kemudian berharap agar perilaku orang-orang didalamnya bisa mengikuti. Diperlukan pendekatan struktural dan sekaligus kultural dalam membangun PKK/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Tani dalam pemanfaatan lahan pekarangan.
9. Introduksi dalam M-KRPL/KRPL lebih melalui budaya material dibanding nonmaterial, atau merupakan perubahan yang bersifat materialistik. Hal ini misalnya terlihat dalam pengembangan KBD dan bantuan sarana produksi kepada kelompok sasaran.
10. Program pendukung dari Pemerintah Daerah tidak dipadukan dengan baik, karena terkesan merupakan Program Pembangunan Pertanian dari pusat. Namun demikian dalam perkembangannya di beberapa wilayah telah terjadi kerjasama antara BPTP (Pemerintah Pusat) dengan BKP (Pemda Provinsi dan Kabupaten), bahkan di beberapa provinsi telah adan MoU dengan pemerintah daerah.

KENDALA-KENDALA POKOK DAN PROSPEK PENGEMBANGAN PROGRAM M-KRPL DAN KRPL

Kendala-Kendala Pokok

Hasil kajian (Saptana *et al.*, 2011; Ashari *et al.*, 2012) tentang optimalisasi lahan pekarangan dalam rangka ketahanan pangan berhasil diidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan optimalisasi lahan pekarangan (DPG, GOP, P2LK, Rumah Hijau) antara lain: (a) Kurang menguasai teknik budidaya terutama pembibitan (kesiapan petani baru menerima siap pajang dalam poly bag dan pemeliharaan), disamping itu ada salah persepsi terhadap manfaat pupuk tertentu, petani menganggap jika diberikan pupuk yang banyak, tanaman akan tumbuh bagus, padahal nyatanya tidak demikian, bahkan dapat menyebabkan kematian tanaman; (b) Ketersediaan air untuk menyiram tanaman pada MK dan di daerah yang kering, terjadi kompetisi penggunaan air untuk tanaman dan untuk rumah tangga; (c) Dalam pengendalian hama dan penyakit, petani tidak terbiasa melakukan pengamatan secara dini. Umumnya petani melaksanakan pengendalian hama dan penyakit setelah serangan terjadi. Hama yang sering dijumpai misalnya kutu kebul, sebenarnya jika petani melakukan pengamatan sejak dini, hama tersebut dapat dicegah dengan cara mekanis atau manual. Oleh karena itu, untuk membiasakan petani melakukan pengamatan secara dini terhadap OPT tanaman hortikultura, maka perlu pendampingan dan pembelajaran melalui tahapan-tahapan: pertumbuhan, pengembangan, hingga mencapai kemandirian.

Kendala-kendala pokok yang dihadapi dalam mengimplementasikan KRPL di Kabupaten Magetan, Karawang, dan TTS adalah (Saptana *et al.*, 2012) : (1) Kendala teknis, mencakup serangan organisme pengganggu tanaman, keterbatasan benih sumber dan KBD, kurang tersedianya teknologi spesifik lahan pekarangan, transfer teknologi yang kurang efektif, serta kesulitan air pada MK sehingga harus pakai PDAM yang peruntukannya sebenarnya untuk kebutuhan RT; (2) Kendala ekonomi, kekurangan modal baik modal investasi maupun modal kerja, tingginya harga input, tujuan pasar terbatas, infrastruktur ekonomi terbatas, dan rendahnya harga jual output; (3) Kendala sosial-kelembagaan, meliputi rendahnya kapasitas SDM pengurus

dan petani, kurangnya partisipasi anggota, sistem koordinasi yang tidak efektif, terbatasnya kapabilitas manajerial kelompok tani, lemahnya konsolidasi kelembagaan PKK; (4) Kendala Kebijakan, mencakup kurangnya program pendukung Pemerintah Pusat dan Daerah. Bentuk dukungan dari pemerintah pusat yang diperlukan adalah introduksi komoditas yang didasarkan atas potensi SDA dan permintaan pasar, penanganan pasca panen dan pendalaman agroindustri, fasilitasi dalam menjalin kemitraan usaha, dan pendampingan dari BPTP secara berkelanjutan. Sementara itu, dukungan dari pemerintah daerah terutama ditujukan untuk replikasi program secara lebih luas dan terencana.

Penyebab utama dari permasalahan dan kendala di atas, adalah : (a) karakteristik dari pemanfaatan lahan pekarangan umumnya masih bersifat sambilan (mengisi waktu luang) dan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga belum berorientasi pasar; (b) rancangan program kurang memperhatikan kegagalan dan *successstory* program-program sebelumnya; (c) sosialisasi program tidak dilaksanakan melalui tahapan dan proses sosial yang matang; (d) menggunakan *entry point* teknologi dan bantuan yang bersifat material; dan (e) pendekatan jangka pendek dan terjebak ego sub sektoral tidak bersifat *multiyears* layaknya program pemberdayaan.

Prospek Pengembangan

Pengembangan M-KRPL secara nasional memiliki prospek yang baik, namun pengembangan M-KRPL tidak dapat diseragamkan untuk semua wilayah. Menurut hasil kajian Saptana *et al* (2011) dan Saptana *et al* (2012) secara teknis M-KRPL dapat diterapkan di lokasi penelitian baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Secara ekonomi semua kelompok komoditas yang dianalisis memberikan keuntungan yang layak dan R/C rasio > 1 (Saptana *et al.*, 2011; Saptana *et al.*, 2012). Secara berturut-turut kelompok komoditas yang memberikan kelayakan ekonomi dari yang tertinggi ke yang terendah adalah kelompok komoditas sayuran, kelompok komoditas biofarmaka, usaha ternak dan ikan serta komoditas umbi-umbian lokal. Program M-KRPL juga mampu mengurangi belanja harian rumah tangga (5 % sampai 10 %), memberikan sumbangan pendapatan (6,81 sampai dengan 15 %) dan mampu menyedia-

kan pangan dengan volume yang lebih besar dan lebih beragam.

Keberlanjutan program KRPL sangat ditentukan oleh aspek pelaksanaan, aspek pendukung, dan aspek promosi (Sudana, 2011). Dalam aspek pelaksanaan harus dipersiapkan secara baik beberapa hal penting berikut : (1) Juklak atau Juknis Program KRPL (Rumah Hijau Plus-Plus) yang mudah dipahami dan diimplementasikan; (2) Sosialisasi program secara berkala pada berbagai tingkatan pelaksana agar mereka termotivasi untuk melaksanakan M-KRPL; (3) Pendampingan secara berkala sehingga tujuan tercapai sesuai rencana; dan (4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan umpan balik guna penyempurnaan M-KRPL atau KRPL (Rumah Hijau Plus-Plus) dan pemecahan masalah teknis di lapangan.

Aspek pendukung yang perlu mendapatkan perhatian adalah : (1) Perlu direncanakan dan disiapkan oleh pihak tertentu tentang kebutuhan benih/bibit dalam satu kawasan sehingga terpenuhi jumlah dan waktu yang tepat; (2) Perlu penyedia alat/rak, media tumbuh seperti pupuk organik/an organik atau pestisida nabati; (3) Kelembagaan pengelola KRPL (Rumah Hijau Plus-Plus) secara partisipatif berbasis kelembagaan PKK; (4) Sebaiknya yang menjadi *leading institution* adalah Badan Ketahanan Pangan (BKP) provinsi dan Kabupaten; (5) Pengembangan industri pengolahan hasil berbasis produksi hasil pekarangan; (6) Kelembagaan pasar dan kemitraan usaha dengan pelaku usaha swasta untuk menampung kelebihan produksi. Kesiapan aspek pendukung saat ini dilokasi penelitian sudah cukup baik untuk kasus Provinsi Jawa Timur dan masih kurang untuk Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Aspek promosi dapat dilakukan melalui: (1) Temu lapang secara berkala untuk memotivasi dusun/desa sekitar yang belum melaksanakan Program KRPL (Rumah Hijau Plus-Plus); (2) Advokasi secara berkala ke Pemangku kebijakan tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi tentang manfaat dan keuntungan ekonomi dari KRPL (Rumah Hijau Plus-Plus); (3) Kegiatan lomba dan penghargaan pemanfaatan pekarangan pada berbagai level atau tingkatan (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional).

Keberlanjutan program KRPL juga sangat ditentukan adanya sinergi antara Program KRPL dengan P2KP (Rana, 2012). Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam perencanaan dan implementasinya perlu dirumuskan bersama terutama dalam aspek: (1) Lokasi (RT, dusun desa, kecamatan, kabu-paten); (2) Kebun Bibit Desa (KBD) tentang desain KBD dan keragaman jenis benih atau bibit yang akan dikembangkan; (3) Pendampingan kelompok sasaran, baik oleh petugas BPTP, Dinas Pertanian, maupun PPL setempat; (4) Teknologi pengolahan berbasis pangan lokal dan produksi pekarangan; dan (5) Promosi, diseminasi, dan replikasi Program KRPL (Rumah Hijau Plus-Plus) ke lokasi atau wilayah lain.

Weinberger dan Lumpkin (2005) menyoroiti semakin pentingnya produksi komoditas hortikultura (buah dan sayuran) serta kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi di perdesaan. Produk hortikultura segar dan produk olahannya menghadapi permintaan yang terus meningkat baik di pasar domestik dan internasional. Terjadi fenomena *value ladder* atau pergeseran pola konsumsi pangan dari komoditas biji-bijian ke arah komoditas bernilai ekonomi tinggi (buah dan sayur serta hasil ternak dan ikan) (Daryanto, 2011). Selanjutnya dikemukakan bahwa perluasan pasar dan liberalisasi perdagangan telah menyediakan peluang baru bagi masyarakat pedesaan untuk keluar dari masalah kemiskinan melalui pengembangan produksi dan pertukaran bukan bahan pangan pokok. Pengembangan hortikultura di perdesaan dalam rangka pengembangan M-KRPL dan KRPL tidak saja melalui pengembangan komoditas unggul lokal, tetapi juga pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi (*high value commodity*) yang dapat memberikan keuntungan tinggi, meningkatkan peluang lapangan kerja dan membawa peningkatan komersialisasi sektor pertanian di perdesaan.

STRATEGI REPLIKASI M-KRPL/KRPL SUATU PENDEKATAN TEKNIS DAN KELEMBAGAAN

Ketahanan pangan suatu bangsa atau negara harus dimulai dari rumah tangga. Salah satu strategi diupayakan melalui diversifikasi pangan dengan pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal. Target pencapaian

PPH (Pola Pangan Harapan) pada tahun 2014 diharapkan mencapai 93,3 dimana pada 2010 baru mencapai 86,4 (Rana, 2012). Salah satu strategi untuk mencapai target tersebut dilakukan melalui Program M-KRPL/KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) atau Rumah Hijau Plus-Plus dalam satu kawasan misalnya dusun/desa.

Pada dasarnya strategi pengembangan Program M-KRPL/KRPL tidak hanya memiliki dimensi teknis, tetapi juga memiliki dimensi kelembagaan. Pemanfaatan inovasi teknologi, inovasi sosial kelembagaan dan kearifan lokal merupakan syarat penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan program. Strategi operasional pengembangan M-KRPL dan replikasi menjadi KRPL dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategi sebagai berikut :

Pertama, model pengembangan M-KRPL dapat dilakukan melalui dua pola, yaitu : (1) Pola yang secara integratif melibatkan beberapa kelembagaan lokal yang ada, seperti Gapoktan/Kelompok Tani serta PKK dan kelompok dasa wisma; dan (2) Pola kelembagaan secara terpadu yang dari hulu hingga hilir di kelola kelembagaan PKK bersama kelompok-kelompok dasa wisma dan Koperasi Wanita (KOPWAN).

Kedua, Pedum M-KRPL perlu terus disempurnakan dengan memasukkan unsur-unsur penting dalam pelaksanaan program sesuai dengan perkembangan di lapangan. Juklak, juknis, maupun petunjuk operasional perlu disusun untuk memandu perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Dengan demikian diharapkan mendapatkan umpan balik pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan.

Ketiga, implementasi pengembangan M-KRPL seharusnya dilakukan melalui tahapan-tahapan dan proses sosial yang matang dan dilakukan dalam periode beberapa tahun (*multiyears*). Secara operasional maka pengembangan M-KRPL dan KRPL dilakukan melalui tahap penumbuhan, pengembangan, pematangan, dan kemandirian. Dalam pelaksanaan replikasi M-KRPL dan pengembangannya dilakukan melalui *entry point* teknologi dan sekaligus kelembagaan. Implementasi program berprinsip pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Keempat, komoditas pangan yang dikembangkan haruslah merupakan sumberdaya lokal, baik kelompok pangan umbi-

umbian, sayuran, buah, serta ternak dan ikan. Umbi-umbian lokal yang dikembangkan berpotensi sebagai bahan makanan pokok atau makanan tambahan sumber karbohidrat, seperti Ubikayu (*cassava*), Ubijalar, Talas, Suweg, Uwi, Gembili, Ganyong, Garut.

Kelima, lembaga pengelola M-KRPL di tingkat masyarakat tidak selalu harus membentuk lembaga baru tetapi bisa menggunakan lembaga yang telah eksis, seperti PKK dengan kelompok dasa wismanya dan gapoktan dengan kelompok taninya, atau dengan mengintegrasikan kedua kelembagaan tersebut. Juga perlu adanya pengembangan infrastruktur pendukung dalam pengembangan M-KRPL meliputi kebun benih/bibit desa (KBD) sebagai sumber benih/bibit di tingkat desa, infrastruktur irigasi spesifik lahan pekarangan, infrastruktur penanganan pascapanen dan pemasaran hasil, dan alat dan mesin pengolahan hasil pertanian.

Keenam, pemerintah tingkat pusat melakukan rencana mengintegrasikan KRPL/KRPL Plus-Plus dengan program P2KP adalah langkah tepat, agar dapat saling memperkuat dan menghasilkan sinergi antar program di suatu kawasan. Dalam konteks pembangunan kawasan di pandang penting pengintegrasian antar Program M-KRPL dengan program-program pembangunan pertanian, terutama dengan Program P2KP. Keterpaduan program mencakup lokasi sasaran, kelompok sasaran, paket program, sehingga terbangun sinergi antar program dalam meningkatkan produksi pangan, pengurangan pengeluaran belanja keluarga, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Ketujuh, replikasi M-KRPL dan pengembangannya dilakukan dengan usahatani lahan pekarangan yang ramah lingkungan, untuk itu perlu juga dilakukan upaya untuk menumbuhkembangkan unit pengolahan limbah skala rumah tangga yang dapat menghasilkan pupuk organik, sebagai media utama dalam penanaman sistem vertikultur dan sistem bedengan dalam rangka menghasilkan produk pertanian organik.

Kedelapan, Badan Litbang dan BPTP masing-masing provinsi harus mengembangkan KBI, KBD, teknologi usaha pertanian spesifik lahan pekarangan, teknologi pengolahan hasil berbasis tepung, serta pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola M-KRPL secara terpadu. Penggunaan teknologi yang lebih maju dan penguatan kelemba-

gan akan menjadi sumber pertumbuhan produktivitas utama di kawasan pengembangan.

Kesembilan, peningkatan kapasitas SDM baik dari aspek keterampilan teknis maupun kapabilitas manajerialnya baik petani maupun pengurus kelompok tani/kelompok wanita tani. Peningkatan keterampilan teknis peserta program M-KRPL dapat dilakukan melalui bimbingan dan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan secara partisipatif. Peningkatan kapabilitas manajerial peserta program dapat dilakukan melalui pengembangan manajemen usahatani, manajemen keuangan, kewirausahaan, pengembangan jaringan bisnis dan kemitraan usaha yang bersifat saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan.

Kesepuluh, diperlukan motivator, penggerak, dan pendamping dalam pelaksanaan Program MKRPL. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki pendamping pembangunan dalam menjalankan tugasnya untuk mendukung Program M-KRPL meliputi: (1) membangun kerja kelompok, (2) menjaga keberlanjutan program, (3) mendorong keswadayaan peserta program, (4) harus tepat sasaran, (5) menumbuhkan saling percaya-mempercayai, dan (6) prinsip pembelajaran bersinambung.

Kesebelas, M-KRPL tidak boleh diseragamkan, haruslah disesuaikan dengan agroekologi dan kondisi sosial ekonomi (pedoman dibuat umum/agar memiliki fleksibilitas dalam implementasinya) : (a) Perlu pendekatan *bottom up* dalam penetapan model (M-KRPL) di suatu wilayah dan sangat dianjurkan untuk melibatkan dukungan Pemda setempat secara intensif sejak awal; (b) Perlu melibatkan kelembagaan ibu-ibu PKK dan kelembagaan pendukungnya (Kelompok Dasa Wisma, Kelompok Wanita Tani, Koperasi Wanita Tani) sejak awal, kelembagaan ini ada disemua tingkatan pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat desa, bahkan hingga tingkat Rukun Tangga

Kedua belas, pada saat program sudah berjalan dan berhasil di suatu wilayah atau kawasan, maka pemasaran produk baik produk segar maupun olahan harus ditangani dengan baik. Penanganan pemasaran perlu melibatkan Pemda, KOPWAN, dan pelaku swasta. BPTP berperan dalam identifikasi teknologi pascapanen dan pengolahan hasil yang sesuai kebutuhan setempat, serta

melakukan pendampingan dalam mengembangkan kemitraan usaha agribisnis.

Ketiga belas, BPTP perlu merancang program *exit strategy* sebagai inisiator, dengan indikator sebagai berikut (Husein Sawit, 2011): (a) Kebun Bibit Desa (KBD) sudah berjalan dengan baik (aspek teknis : infrastruktur fisik, ketersediaan bahan dan alat, ketersediaan dan kualitas benih/bibit; ekonomi : modal awal, iuran/ jimpitan/pungutan, dukungan dana Pemda dan Desa; dan kelembagaan pengelolaanya: struktur, fungsi, aturan main, mekanisme interaksi, dan sistem koordinasi), (b) Kelompok atau kelembagaan pengelola program M-KRPL/KRPL/KRPL Plus-Plus sudah terbentuk dan berjalan secara aktif, (c) Masyarakat sudah merasakan manfaat program M-KRPL/KRPL/KRPL Plus-Plus baik langsung maupun tidak langsung; dan (d) Selanjutnya BPTP bertindak fokus pada penyedia teknologi dan dalam batas-batas tertentu melakukan pendampingan bersifat selektif.

PENUTUP

Program-program pemanfaatan lahan pekarangan yang dilakukan selama ini BELUM berjalan efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui konsep M-KRPL optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan diharapkan dapat ditingkatkan, utamanya melalui berbagai inovasi yang telah dihasilkan Badan Litbang Pertanian. Namun dari hasil implementasinya, Program M-KRPL perlu disempurnakan, antara lain terkait dengan rancangan program, jangka waktu pelaksanaan, organisasi pelaksana, serta teknologi yang diintroduksikan dan kelembagaan lokal apa yang dipilih untuk didayagunakan. Pedoman umum perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta petunjuk operasional, sehingga seluruh *stakeholders* yang tercakup dapat menjalankan fungsi atau perannya secara optimal.

Implementasi pengembangan M-KRPL harus dilakukan melalui tahapan-tahapan dan proses sosial yang matang dan dilakukan dalam periode beberapa tahun (*multiyears*), yaitu melalui tahap penumbuhan, pengembangan, pematangan, dan kemandirian melalui *entry point* teknologi dan kelembagaan. Implementasi program harus bersandar pada prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu

menumbuhkembangkan potensi masyarakat, mengembangkan gotong-royong masyarakat, menggali kontribusi masyarakat, menjalin kemitraan dan desentralisasi dengan tahapan penyadaran, pelatihan, pegorganisasian, pengembangan kekuatan dan membangun dinamika.

Pengembangan M-KRPL secara nasional memiliki prospek yang baik, jika dilakukan melalui pendekatan yang benar dan implementasi yang efektif. Secara teknis M-KRPL dapat diterapkan di lokasi penelitian baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Secara ekonomi semua kelompok komoditas yang dianalisis memberikan keuntungan yang layak dan R/C rasio > 1. Program M-KRPL juga mampu mengurangi belanja harian rumah tangga dan mampu menyediakan pangan dengan volume yang lebih besar dan lebih beragam. Program M-KRPL/KRPL telah terbukti meningkatkan PPH.

Keberlanjutan Program KRPL perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu : (a) menetapkan prioritas area lokasi (tidak harus ada disemua lokasi); (b) penentuan kelompok sasaran dan anggota secara tepat; (c) memasukkan komoditas unggulan lokal; (d) membangun KBI, KBD, KBRT yang menjamin tersedianya benih yang memenuhi aspek keragaman jenis, kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyediaannya; (e) konsolidasi kelembagaan pengelola M-KRPL/KPL baik dari aspek kepengurusan (manajemen), keanggotaan, permodalan, serta jaringan kerja (*networking*); (e) sistem koordinasi yang efektif antar *stakeholders* yang melibatkan ABGC, yaitu : akedemisi (peneliti dan perguruan tinggi), pelaku usaha swasta (*businessmen*); pemerintah baik pusat, daerah, dan desa (*government*); dan kelompok atau masyarakat yang menjadi sasaran program (*community*) yang ada di masing-masing wilayah pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antarlina, S.S., 1994. Utilization of Sweet Potato Flour for Making Cookies and Cakes. *In* Hendroatmodjo, K.H.Y. Widodo, Sumarno, and B. Guritno (Eds). Research Accomplishment of Root Crops for Agricultural Development in Indonesia. Research Institute for Legume and Tuber Crops. Malang, Indonesia. P.127-132.

- Ariani, M dan T. B. Purwantini. 2007. Analisis Konsumsi Pangan Rumah tangga Pasca Krisis di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Soca* No. 3 Tahun XIV April 2007.
- Ariani, M. 2010. Analisis Konsumsi Pangan Tingkat Masyarakat Mendukung Pencapaian Diversifikasi Pangan. *Gizi Indon* 33(1):20-28.
- Arifin, B. 2010. Masa Depan Ketahanan Pangan Indonesia di Tengah Perubahan Iklim Global. *Agrimedia*, Volume 15 No. 2 Desember 2010, hal 4-9.
- Arifin, B. 2012. Pengembangan Kelembagaan Pangan. Lampiran Prosiding Konperensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2012. Kumpulan materi yang disampaikan dalam Rangkaian Agenda Konferensi Dewan Ketahanan Pangan 2012. Dewan Ketahanan Pangan.
- Ashari, Saptana dan T. B. Purwantini. 2012. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. *Forum Agro Ekonomi*, Volume 30 No. 1, Juli 2012, hal 13-30.
- Badan Litbang Pertanian. 2011. Pedoman Umum Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Badan Litbang Pertanian. 2012. Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) : Konsep, Implementasi dan Eskalasi. Pertemuan FKPR bersama Kepala Badan Litbang Pertanian, Jakarta, 25 Nopember 2011.
- Bantacut, T. 2008. Kebijakan Pengembangan Agroindustri Perdesaan. Direktorat Jendral Pengolahan Hasil Pertanian, Jakarta.
- BBP2TP. 2012. Implementasi M-KRPL 2011 & 2012 dan Pembimbingan Workshop. Workshop Evaluasi KRPL 2011 & 2012 dan Rencana 2013. Bandung, 10 ÷ 12 Desember 2012.
- BBP2TP. 2012. Implementasi M-KRPL 2011-2012 dan Pembimbingan Workshop Konsolidasi 2012. Workshop Konsolidasi M-KRPL 2012 Jakarta, 25 ÷ 27 April 2012. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- BKP. 2012. Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyu Asin. Banyu Asin.
- BKP. 2010. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014. Badan Ketahanan Pangan. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- BKPD Jawa Timur. 2011. Pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (Rumah Hijau Plus Plus). Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Budiningsih, R. 2009. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Diversifikasi Konsumsi Pangan Non Beras di Kabupaten Magelang. Tesis S2 (tidak dipublikasikan). Program Magister Agribisnis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Danoesastro, H. 1978. Tanaman Pekarangan dalam Usaha Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Pedesaan. *Agro ÷ Ekonomi*. Maret 1978.
- Daryanto, A. 2011. Nilai Tambah Peternakan Melalui Agroindustri. TROBOS. No. 137 Februari 2011 Tahun XII.
- Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2012. Kumpulan Materi yang disampaikan dalam Rangkaian Agenda Konferensi Dewan Ketahanan Pangan 2012. Dewan Ketahanan Pangan.
- Disperta Jatim. 2011. Rumah Hijau : Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan di Provinsi Jawa Timur. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Ditjen P2HP. 2012. Kebijakan Pengembangan Tepung Lokal (*Cassava*). Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta.
- DKP. 2012. Percepatan Pencapaian Swasembada Lima Komoditas Pangan Pokok. Prosiding Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2012. Jakarta.
- DKP. 2012. Lampiran Prosiding Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2012. Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- FAO. 2001. The Stage of Food Insecurity in the World, 2001, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
- Heal, G.M. 1998. Interpreting Sustainability, in G. Chichilnisky, G.M. Heal and A. Vercelli, eds., *Sustainability: Dynamics and Uncertainty*. Dordrecht: Kluwer.
- Hendroatmodjo, K.H., Y. Widodo, Sumarno, and B. Guritno (*Eds.*). Research Accomplishment of Root Crops for Agricultural Development in Indonesia. Research Institute for Legume and Tuber Crops, Malang, Indonesia. p.127-132.
- Mardikanto, T. 1994. Bunga Rampai Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Solo.
- Novitasari, E. 2011. Studi Budidaya Tanaman Pangan di Pekarangan Sebagai Sumber Ketahanan Pangan Keluarga (studi Kasus di Desa Ampel Gading Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.

- Pepres Kebijakan P2KP. 2009. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
- Permentan P2KP. 2009. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
- Pezzey, J. 1992. Sustainable Development Concept : An Economic Analysis. World Bank, Washington, D.C.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. Kamus umum Bahasa Indonesia. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Balai Pustaka. Jakarta.
- PPHP. 2011. Kebijakan Pengembangan Tepung Lokal (Cassava). Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Jakarta.
- Rachman, H.P.S., M. Ariani, B. Wiryono, H. Mayrowani, T.B. Purwantini, T.D. Permata, M. Iqbal. B. Prasetyo dan M. Mardiharini. 1996. Peranan Wanita dalam Sistem Produksi Pertanian Menunjang Program Diversifikasi Pangan dan Gizi. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Rana, G. K. 2012. Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Sinerginya dengan KRPL. Makalah Disampaikan Pada : Workshop Konsolidasi M-KRPL 2012 Jakarta, 25 April 2012. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Reublik Indonedsia. Jakarta.
- Revisi UU Pangan. 1996. Revisi Undang-Undang Pangan No. 7 tentang Pangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Reublik Indonedsia. Jakarta.
- Rusastra, I W., S. H. Susilowati, and J. Situmorang. 2011. Dampak Pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga dan Ekonomi di Perdesaan. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Rusastra, I. W., Sumaryanto, dan P. Simatupang. 2005. Agricultural Development Policy Strategies For Indonesia : Enhancing The Contrubution of Agrculture to Proverty Reduction and Food Security. Forum Agroekonomi 23 (2) : 84-101.
- Saptana, Sunarsih, dan S. Friyatno. 2012. Analisis Kebijakan dan Program Model-Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Saptana, T. B., Purwantini, Y. Supriyatna, Ashari, A. M. Ar-Rozi, Tj. Nurasa, S. Haryono, I W. Rusastra, S.H. Susilowati dan J. Situmorang. 2011. Dampak Pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga dan Ekonomi di Perdesaan. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Sawit, M. H. 2012. Penumbuhan/Penguatan Kelembagaan KRPK atau KRPL yang Berkelanjutan? Forum Komunikasi Profesor Riset. Makalah Disampaikan Pada : Workshop Konsolidasi M-KRPL 2012 Jakarta, 25 April 2012. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Sayogya. 1994. Menuju Gizi Baik Yang Merata di Pedesaan dan Di Kota. Gajah Mada Press. Yogyakarta.
- Sudana, W. 2011. Keberlanjutan Program KRPL. Makalah Disampaikan Pada : Workshop Konsolidasi M-KRPL 2012. Jakarta, 25 April 2012. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Sumaryanto. 2009. Diversifikasi sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Pangan. Makalah disampaikan pada Seminar Memperingati Hari Pangan Sedunia, Jakarta, 1 Oktober 2009.
- Suryana, A. 2012. Percepatan Diversifikasi Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan. Makalah disampaikan pada Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Jakarta pada 17 Juli 2012.
- Syahyuti, 2012. Pengorganisasian Diri Petani Dalam Menjalankan Agribisnis di Pedesaan : Studi Lembaga dan Organisasi Petani Dalam Pengaruh Negara dan Pasar. Ringkasan Disertasi S3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pascasarjana Sosiologi, Universitas Indonesia.
- Terra, G.J.A. : Tuinbouw : Van Hall en C. Van de Koppel : De Landbouw in de indische Archpel.IIA, 1949. Terjemahan Haryono Danoesastro.
- UU Pangan. 1996. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Reublik Indonesia. Jakarta.
- Weinberger, K. and T.A. Lumpkin. 2005. Horticulture for Poverty Alleviation the unfunded Revolution. Shanhua, Taiwan: AVRDC i The World Vegetable Center,
- AVRDC Publication No. 05-613, Working Paper No. 15. 20 pp.
- Yusuf A. B. 2011. Konsep Pekarangan. http://www.infogue.com/viewstory/2011/07/26/konsep_pekarangan/?url=http://euisnovitasari.blogspot.com/2011/07/konsep-pekarangan.html (7/10/2011).

